



PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN TAMAN POCI KOTA TEGAL

Deni Riza Kurniawan¹, Yuwanto, Ph.D², Nunik Retno H, S.sosi, M.si³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl Prof. H. Soedarto, SN H, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
website:<http://www.fisip.undip.ac.id> email:fisip@undip.ac.id

Abstrak

Alasan yang melatarbelakangi penulis dalam menulis karya ilmiah ini bahwa Pada tahun 2010 pemerintah Kota Tegal melakukan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Taman Poci Kota Tegal, para PKL direlokasi ke dalam lapangan PJKA yang berada tepat di depan taman poci. Relokasi ini berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut muncul masalah, dimana tempat sekarang pedagang berjualan dianggap tidak layak. Hal ini dikarenakan lapak-lapak pedagang yang sebagian besar semi permanen tidak tertata dengan baik, tidak adanya akses jalan bagi pembeli dan tidak adanya aliran listrik ditempat tersebut. Keadaan tersebut kian diperparah dengan kondisi akses jalan yang becek jika turun hujan. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan para pedagang kaki lima yang kian hari kian merugi bahkan ada yang terpaksa menjual lapaknya. Kondisi tersebut juga yang mendorong para PKL untuk kembali berjualan di tempat yang lama, hal ini pun mendorong pemerintah daerah untuk kembali melakukan penertiban dengan menyita barang dagangan dan gerobak tempat mereka berjualan. Hal ini juga menimbulkan berbagai persepsi dikalangan para pedagang tentang penerapan kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan persepsi PKL terhadap kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan suatu gejala yang ditentukan dan menganalisa gejala tersebut, dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan PKL terhadap kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal masih kurang, hal ini dikarenakan tidak dilibatkannya PKL pada saat pembuatan kebijakan. Persepsi PKL terhadap kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal adalah Pemerintah Kota Tegal dianggap asal-asalan dalam merelokasi para PKL.

Kata Kunci : Persepsi, Kebijakan, PKL

Abstract

Reasons behind the author in writing this paper that in 2010 the government of Tegal have relocated street vendors in the Poci Park, Tegal, the street vendors were relocated to the field of PJKA which is right in front of the Poci Park. The relocation was based on Regulation No. 3 of 2008 on Street Vendors settings. However, in implementation the policy arise problems, which the place that the vendor selling now was deemed unfit. This is because the shanties of the

vendors which mostly semi-permanent is not well ordered, no access roads to the buyer and the absence of electricity in there. The situation is exacerbated by the condition of access roads muddy if it rains. This affects the level of income the vendors who were increasingly losing. Some even forced to sell their shanties. The condition also is encouraging vendors to be selling back in the old place, it also encourages local governments to re-right the situation by confiscating merchandise and carts where they are selling. It also raises a variety of perceptions among the traders about the application of the policies.

The purpose of this study was to determine the level of knowledge and perception of Street Vendors to the policy of restructuring the Poci Park area, Tegal. This study uses descriptive type is the type of research that aims to depict or describe the symptoms and analyze the symptoms, using a quantitative approach.

The results showed that the level of knowledge the street vendors on policy restructuring the Poci Park area of Tegal is still lacking, it is because not involve street vendors during the making of policy. The perception of street vendors towards restructuring policies the Poci Park area of Tegal is the city government considered carelessly in relocating the street vendors.

Keywords: Perception, Policy, street vendors

¹ Deni Riza Kurniawan adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang alamat email : deniriza10@gmail.com

²Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PKL merupakan salah satu bentuk dari usaha disektor informal. Menurut (Alisjahbana, 2006: hlm 13) Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, dan menggelar dagangannya di ruang publik, seperti trotoar, pinggir jalan atau juga di bantaran kali. Sektor informal sendiri merupakan tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Kondisi PKL di Kota Tegal tidak berbeda jauh dari daerah lain dimana mereka menggelar dagangannya di atas trotoar atau bahkan di taman kota. Di sepanjang jalan protokol di Kota Tegal juga banyak dijumpai para PKL yng sedang menjajakan barang dagangannya, hal ini juga terjadi di taman kota yaitu Taman Poci Kota Tegal. Perkembangan PKL di kota Tegal

akhirnya sulit dikendalikan. Dampaknya kota menjadi lautan PKL, menurut data BPS Kota Tegal dengan luas wilayah yang hanya 39,68 kilometer persegi terdapat 6.467 usaha PKL. Artinya, secara rata-rata per kilometer persegi tidak kurang didiami 163 PKL, suatu kepadatan yang relatif tinggi. Besarnya populasi ini akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tata ruang kota, sosial, hukum dan ketertiban umum. Kota menjadi terkesan semrawut, kumuh dan keberadaannya akan mengganggu keindahan kota. Apalagi keberadaan mereka pun terkesan tidak tahu aturan dengan menggelar dagangan pada wilayah-wilayah publik seperti trotoar, bahu jalan, bantaran kali, di atas saluran. Bahkan ada yang memanfaatkan taman kota untuk mendirikan tenda-tenda sehingga menghilangkan fungsi taman kota sebagai paru-paru hijau seperti di kawasan Taman Poci Kota Tegal.

B. Kajian Teori

Persepsi menurut (Kotler, 2000:19)¹ adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi juga bisa berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana seorang yang tidak dapat melihat, akan lebih banyak menggunakan imajinasinya dalam membentuk sebuah persepsi atas objek yang dipegang, diraba, dicium. Dikaitkan definisi persepsi menurut Kotler, maka persepsi masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dimiliki oleh seseorang dalam menilai dan menginterpretasikan obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh yang akhirnya menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan secara keseluruhan.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, bahwa proses persepsi melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada.
2. Tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi.
3. Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu.

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Anderson, implikasi dari suatu kebijakan tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan .

¹ Bimo, Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

1. Bahwa kebijakan pemerintah berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat.
2. Bahwa kebijakan pemerintah adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud ingin melakukan sesuatu.
3. Bahwa kebijakan pemerintah bersifat positif, yang merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan pemerintah tidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah, biasanya banyak aktor yang terlibat didalamnya. Aktor-aktor tersebut bisa menjadi dua, yaitu aktor pelaksana kebijakan dan aktor objek kebijakan (penduduk yang terkena atau menjadi tujuan). Keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada aktor-aktor tersebut. Suatu kebijakan akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota dari masyarakat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan banyak ditemui hambatan sehingga kebijakan tersebut gagal dilaksanakan. Dalam bukunya (Indiahono, 2009;20)² menurut Patton dan Sawicki bahwa kegagalan utama dari suatu kebijakan adalah disebabkan oleh tidak adanya sumber daya manusia atau pembuat dan pelaksana kebijakan yang mempunyai keahlian berkompeten. Disamping keahlian, unsur lain adalah komitmen yang besar dari pelaksana kebijakan yang dilaksanakan. Tanpa adanya dua hal tersebut, dijamin implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Dalam hal kegagalan implementasi kebijakan, mungkin disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. Pada suatu wilayah, kebijakan itu dianggap terlalu kaku (tidak luwes) sehingga sangat sulit untuk menerapkannya, karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.
2. Kebijakan itu tidak mendapat respon dari masyarakat karena kebijakan tersebut tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat setempat.

Apabila pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat sekitar, maka biaya yang harus ditanggung akan menjadi lebih besar, baik sosial maupun finansial.

Selain konflik tanah, pengusuran, dan permukiman kumuh, salah satu persoalan serius yang dihadapi berbagai kota besar dewasa ini adalah keberadaan sektor informal, khususnya pedagang kaki lima menurut. Menurut (Alisjahbana, 2006:13)³ dalam pandangan Rachbini para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota

² Dwiyanto, Indiahono 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.

³ Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informasi Perkotaan*. Surabaya : ITS Press.

sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakan marginala, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedang dikatakan tidak berdaya, karena biasanya mereka tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindung oleh hukum, posisi bergaining (tawar menawar) nya lemah, dan acapkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang represif. Dalam kaitannya PKL merupakan sektor ekonomi yang dipandang sebelah mata oleh pemerintah karena posisi mereka yang lemah dikarenakan pendidikan yang rendah dan tidak ada payung hukum yang menaunginya.

Adapun menurut (Wirosardjono, 1985:7) sektor informal perkotaan yang ada hanyalah batasan tentang ciri-ciri kegiatan ekonominya. Ciri-ciri tersebut diturunkan dari kondisi nyata dari berbagai kegiatan sejumlah tenaga kerja yang umumnya berpendidikan rendah, tidak mempunyai ketrampilan, dan bekerja di sektor ekonomi marginal atau informal. Dalam kaitannya bahwa rata-rata masyarakat yang berpendidikan rendah dan kurang memiliki ketrampilan cenderung memilih sektor informal sebagai mata pencaharian sehari-hari.

C. Metode Penelitian

I. Tipe Penelitian

Penelitian adalah suatu cara untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, adapun jawaban permasalahan tersebut berupa data-data hasil penelitian yang didapat dari penggunaan metode-metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut : penulis dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif, yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan suatu gejala yang ditentukan dan menganalisa gejala tersebut, dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif.

2. Populasi dan Sampling

Pada Penelitian Kuantitatif Populasi dan Sampel merupakan sumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan focus penelitian.

2.1 Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang akan di teliti, yaitu kawasan Taman Poci Kota Tegal sebagai tempat penataan para PKL.

2.2 Sampling

Pada penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampling non propability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Kemudian digunakan teknik purposive sampling yaitu teknik yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Informan pertama pada penelitian ini adalah

penanggung jawab dari kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal yaitu pemerintah Kota Tegal, serta informan selanjutnya adalah Dinas khusus yang bertanggung jawab dalam menangani penataan kawasan atau relokasi PKL di kawasan Taman Poci Kota Tegal.

Dikutip dari (Ahmad Taufik, 2007:12) untuk mendapatkan sampel yang menggambarkan dan mencandran populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Frank Lynch sebagai berikut :

$$N = \frac{NZ^2Xp(1-P)}{Nd^2+z^2Xp(1-P)}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

Z = Nilai Variabel, normal dalam penelitian ini 1,96

P = Harga patokan tertinggi yang ditentukan , yaitu 0,5 (untuk kepentingan ketepatan)

d = Sampling error, dalam penelitian ini yaitu 0,1

Tabel 1.

Jumlah PKL Taman Poci yang terkena kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal

NO.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah PKL Taman Poci yang Direlokasi	190

Sumber : Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Tegal

Perhitungan Sampel yang akan diambil

$$n = \frac{NZ^2Xp(1-P)}{Nd^2+z^2Xp(1-P)}$$

$$n = \frac{190 (1,96)^2 \times 0,50 (1-0,50)}{190 (0,1)^2 + (1,96)^2 (0,50)(1-0,50)}$$

$$n = \frac{190 \times 3,841 \times 0,25}{1,9 + 3,841 \times 0,25}$$

$$n = \frac{182.4475}{2.86025}$$

$$n = 63.787$$

n = 64 yang menjadi sampel dari penataan PKL di kawasan Taman Poci Kota Tegal

Dikutip dari (Arikunto, 2006) Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur *Cluster Sampling* yakni proses pemilihan sampel dimana seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Sedangkan metode yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu cara pemilihan sampel dimana anggota dari populasi dipilih satu persatu secara random atau dengan kata lain semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan jika sudah dipilih lagi.

Setelah ditentukan sampel yang mewakili populasi dari masyarakat ini, kemudian ditentukan dengan system random acak sederhana untuk menentukan sampel pada penelitian, kemudian untuk Dinas yang bertanggung jawab dalam penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal dilakukan in-depth interview untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dengan menggunakan metode purposive dimana sample yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidangnya.

1. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah data-data yang secara langsung diambil dengan menggunakan wawancara, dan observasi langsung ke objek penelitian. Mencakup wawancara dengan pihak dinas, badan lain dan para PKL yang termasuk dalam penataan PKL di kawasan Taman Poci Kota Tegal. Sedangkan observasi yakni terjun langsung ke lapangan untuk melihat hasil pelaksanaan penataan PKL di kawasan Taman Poci Kota Tegal.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, majalah-majalah dan dokumen-dokumen serta data pendukung dari instansi terkait.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode wawancara:

- a. Wawancara Terstruktur : Wawancara terstruktur (*structured*)

interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi *training* agar mempunyai kemampuan yang sama.

Metode observasi

a) Metode wawancara

Wawancara disini adalah percakapan yang dilakukan peneliti dengan maksud tertentu. Dalam metode wawancara yang digunakan, peneliti akan mewawancarai para pedagang kaki lima di kawasan Taman Poci Kota Tegal yang terkait dengan Persepsi pedagang kaki lima terhadap penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui secara rinci mengenai bagaimana persepsi pedagang dalam penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal. Berdasarkan taxonomi bentuk pertanyaannya, wawancara dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu verbal dan non verbal. Ada dua bentuk pertanyaan verbal yaitu pertanyaan langsung dan tidak langsung; sementara itu untuk yang non verbal juga mempunyai dua bentuk pertanyaan yaitu overt dan covert. Sementara itu pertanyaan langsung dari verbal mempunyai dua bentuk yaitu tertutup dan terbuka.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam, pemilihan model wawancara ini didasarkan atas kemampuan model ini untuk terhindar dari bias.

1. Wawancara Terstruktur (Structured interview)

Sebuah wawancara terstruktur adalah teknik penelitian Kuantitatif dengan wawancara dimana hal-hal yang akan ditanya-jawabkan telah tersusun rapi dalam bentuk tertulis. Contoh dari teknik wawancara terstruktur yaitu survey. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara mewawancarai responden dengan pertanyaan yang sama dan dalam urutan yang sama pula. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan data penelitian yang siap untuk diperbandingkan berdasarkan sub – sub kelompok yang berbeda. Data yang dikumpulkan oleh pewawancara bukan melalui kuesioner yang dipegang sendiri. Dalam proses wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada responden secara urut dan selalu dijawab dalam konteks yang sama. Dalam suatu pertanyaan, setiap jawaban yang diberikan, bergantung pada sifat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.

2. Wawancara mendalam

b) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian observasi non partisipatoris dimana peneliti melakukan proses pengumpulan data dan

informasi tanpa menitikberatkan diri atau tidak menjadi bagian dan lingkungan objek penelitian. Observasi ini mencakup observasi langsung ke objek penelitian untuk melihat tingkat pelaksanaan pembangunan antara yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*) apakah telah terjadi ketimpangan di lapangan. Data pendukung dapat diperoleh melalui dokumentasi berupa foto/gambar, buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian, dll

1. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif oleh Huberman dan Miles. Model ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1.1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

Dalam proses analisis ini, setelah peneliti memperoleh data dari lapangan mengenai bagaimana persepsi pedagang kaki lima terhadap penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal, kemudian peneliti akan memilah-milah antara data yang relevan dengan penelitian dan data yang tidak relevan dengan penelitian ini.

1.1 Penyajian

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai bagaimana Adapun penyajian data adalah dalam bentuk teks naratif. Bentuk penyajian data teks naratif tersebut dipilih karena penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian tidak dalam bentuk angka.

1.3 Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis data yang terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dari Verifikasi, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Kesimpulan yang dipaparkan merupakan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan yakni penelitian mengenai persepsi pedagang kaki lima dalam penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal. Selain menarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan, penelitian juga akan melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya serta kecocokannya yang merupakan validitasnya

PEMBAHASAN

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

Pengetahuan adalah salah satu yang penting untuk membentuk sebuah persepsi pada suatu hal yang terjadi. Perlu bagi para PKL untuk mempunyai pengetahuan tentang suatu kebijakan, apalagi kebijakan yang menyangkut tentang keberadaan mereka. Agar nantinya mereka paham akan maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Sejauh ini para PKL belum memiliki pengetahuan atau belum paham akan kebijakan yang menyangkut tentang keberadaan mereka. Para PKL pun belum paham akan maksud dari kebijakan penataan kawasan taman poci di Kota Tegal. Sosialisasi sangat diperlukan agar nantinya tidak terjadi kesalahan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan tersebut, dalam hal ini para PKL pada khususnya, sosialisasi juga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Tegal telah melakukan sosialisasi dengan intensitas yang sering, tetapi ada kesimpangsiuran informasi yang diberikan dalam sosialisasi. Kesimpangsiuran tersebut antar lain tentang sebab-sebab dilakukannya penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal. Hal ini mengakibatkan para PKL kurang paham akan maksud dan tujuan dari kebijakan penataan kawasan taman poci. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan hendaknya pemerintah memberikan waktu yang cukup, khususnya bagi yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut yaitu para PKL. Para PKL menganggap waktu yang terlibat diberikan oleh pemerintah Kota Tegal dirasa tidak lama atau kurang.

Dalam penerapan kebijakan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, pihak-pihak tersebut berperan sesuai dengan fungsinya dan memiliki tujuan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Para PKL pun paham akan dinas-dinas yang terlibat dalam kebijakan tersebut antara lain Disperindagkop dan UKM, Diskimtaru, serta Dishubkominfo Kota Tegal. Bahwa dalam implementasi kebijakan akan lebih baik jika pelaksana kebijakan itu adalah tunggal atau paling tidak satu pihak yang dominan, karena itu jika banyak pihak yang terlibat maka akan timbul suatu permasalahan khusus dalam hal tanggung jawab dan koordinasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu jika memang dibutuhkan banyak pelaksana maka harus ada pihak yang berfungsi sebagai koordinator dalam hal tanggung jawab dan hubungan koordinasi tersebut (Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002:101).

Para PKL belum paham akan maksud dan tujuan dari kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal. Hal ini dikarenakan bahwa Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal tidak jelas. Para PKL pun ingin tahu lebih jelas tentang kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal yang berimbas nasib mereka nantinya. Mereka berinisiatif untuk datang ke Disperindagkop untuk meminta kejelasan informasi tentang kebijakan dan juga nasib mereka nantinya. Dalam proses implementasi kebijakan tersebut pedagang menyatakan kurang diberi cukup waktu guna pindah ke tempat yang baru. Dalam relokasi PKL biasanya untuk pembangunan lapak yang baru biaya dibebankan seluruhnya kepada PKL atau sebagian ditanggung juga oleh pemerintah tetapi dalam relokasi PKL Taman Poci ini pemerintah tidak

pernah meminta dana guna untuk pembangunan lapak. Pemerintah justru memberikan dana sebesar Rp. 40.000,00 kepada para PKL yang merupakan dana pemberdayaan PKL.

Setiap penerapan kebijakan pasti ada evaluasi kebijakan. Evaluasi ini guna menilai atau mengukur berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Para PKL mengaku kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan tidak munculnya masalah baru, yaitu ketidakjelasan nasib PKL pasca relokasi. Tempat relokasi yang diberikan oleh pemkot terkesan kumuh karena tidak dilengkapi akses jalan yang memadai dan saluran listrik guna penerangan.

Dalam penerapan sebuah kebijakan pasti akan ditemui suatu hambatan, baik datangnya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal, menurut para PKL berasal dari pemerintah sendiri. Hal ini dikarenakan proses relokasi yang terkesan asal-asalan, dimana tempat relokasi dianggap tidak layak untuk berjualan. Di tempat relokasi tidak ada akses jalan yang baik, jika hujan turun lokasi relokasi akan becek karena air hujan dan tempat relokasi jadi terlihat kumuh.

Kegagalan utama dari suatu kebijakan adalah disebabkan oleh tidak adanya sumber daya manusia atau pembuat dan pelaksana kebijakan yang mempunyai keahlian atau berkompeten. Disamping keahlian, unsur lain adalah komitmen yang besar dari pelaksana kebijakan yang dilaksanakan. Tanpa adanya dua hal tersebut, dijamin implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Dalam hal kegagalan implementasi kebijakan, mungkin disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. Pada suatu wilayah, kebijakan itu dianggap terlalu kaku (tidak luwes) sehingga sangat sulit untuk menerapkannya, karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.
2. Kebijakan itu tidak mendapat respon dari masyarakat karena kebijakan tersebut tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat setempat.

Apabila pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat sekitar, maka biaya yang harus ditanggung akan menjadi lebih besar, baik sosial maupun finansial.

Kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal dinilai gagal, hal ini disebabkan oleh tidak adanya sumber daya manusia atau pembuat dan pelaksana kebijakan yang mempunyai keahlian atau berkompeten. Kegagalan ini dinilai dari tidak terwujudnya tujuan awal dari kebijakan penataan kawasan Tamana Poci Kota Tegal serta munculnya masalah baru dari penerapan kebijakan tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan proses relokasi yang dinilai asal-asalan.

Persepsi PKL terhadap kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal adalah mereka menganggap bahwa pemerintah Kota Tegal dalam menerapkan kebijakan ini dinilai asal-asalan, hal ini dikarenakan tempat relokasi yang dinilai tidak layak untuk ditempati. Para PKL juga tidak yakin terhadap perbaikan dalam penyelesaian masalah di sekitar kawasan Taman Poci Kota Tegal. Hal ini dikarenakan pemerintah masih setengah hati dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para PKL. Para PKL menyatakan jika mereka sampai saat ini tidak

setuju dengan kebijakan tersebut dikarenakan tempat yang mereka berjualan tergolong tidak layak. Dimana tempat yang baru tidak dilengkapi fasilitas yang memadai seperti akses jalan dan juga aliran listrik, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan mereka. Sebuah kebijakan pada dasarnya memiliki manfaat yang baik, dalam hal ini baik bagi pemerintah maupun juga bagi masyarakat, tetapi para PKL di Taman Poci menyatakan bahwa manfaat yang dirasakan dari kebijakan ini adalah tidak baik. Hal ini dikarenakan dalam penerapan kebijakan muncul masalah baru. Yaitu masalah relokasi yang terkesan asal-asalan yang berakibat tidak adanya kejelasan nasib mereka selama 2 tahun. Para PKL pun merasa tidak puas, dikarenakan pemerintah lamban dalam menyelesaikan masalah yang muncul pasca relokasi pedagang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Persepsi PKL terhadap kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal adalah Pemerintah Kota Tegal dianggap setengah hati dalam melaksanakan kebijakan tersebut, hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi dan kesimpangsiuran informasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tegal. Oleh karena itu PKL pun tidak paham maksud dan tujuan dari kebijakan penataan kawasan Taman Poci, padahal kebijakan tersebut menyangkut tentang keberadaan para PKL itu sendiri.
2. Persepsi PKL terhadap implementasi kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal adalah Pemerintah Kota Tegal dianggap hanya dapat menata kawasan Taman Poci Kota Tegal, tetapi tidak dapat mengelolanya dengan baik. Pemerintah Kota Tegal juga dianggap asal-asalan dalam merelokasi para PKL. Hal ini terlihat dari masalah baru yang timbul, seperti : lokasi baru yang kumuh, keadaan akses jalan, dan aliran listrik yang kurang memadai. Hal-hal tersebut dipandang memengaruhi pendapatan para PKL karena para pembeli jarang ada yang masuk ketempat PKL yang baru.
3. Persepsi PKL terhadap manfaat kebijakan penataan Kawasan Taman Poci Kota Tegal bahwa manfaat yang dirasakan oleh PKL adalah tidak baik. Karena dalam penerapan kebijakan justru menimbulkan masalah baru. Para PKL terkesan direlokasi dengan cara asal-asalan dan selama kurang lebih 2 tahun nasib mereka tidak ada kejelasan. Mereka menganggap sejauh ini hanya masalah dan kerugian saja yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut. Tidak ada keuntungan atau manfaat yang bisa dirasakan oleh para PKL. Masalah tersebut diantaranya tempat relokasi yang tidak layak sehingga membuat mereka rugi.

B. Rekomendasi

Seharusnya pemerintah Kota Tegal belajar dari daerah lain seperti Solo yang melakukan relokasi PKL dengan cara yang baik, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan

meminimalisir hambatan hambatan yang terjadi. Ada beberapa rekomendasi dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para PKL sebelum menerapkan kebijakan, agar nantinya dapat meminimalisir hambatan hambatan yang terjadi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan membagi surat edaran, dan juga dengan cara dialog antara pemerintah dengan PKL. Dalam memberikan informasi hendaknya pemerintah melakukannya dengan jelas, agar nantinya tidak ada kesalah pahaman antara PKL dengan pemerintah.
2. Dalam memberikan tempat relokasi agar pemerintah dapat menyediakan tempat yang layak untuk para PKL berjualan, seperti menyediakan lapak, akses jalan dan aliaran listrik yang memadai agar para pembeli dapat nyaman berbelanja dan secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para PKL.
3. Dalam penerapan kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal, hendaknya para PKL mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat meminimalisir masalah yang akan timbul karena tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan dari penerapan kebijakan.

